



Perempuan dan Politik: Masalah Perpolitikan Perempuan di Indonesia

Lalu Rana Rajaba Sakti¹, Eka Nurdiansyah²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

lalu.rana.psc22@mail.umy.ac.id

Abstract

This research aims to explore whether there is sexism in Islamic leadership, with a case study on the Indonesian presidential election after Megawati Soekarnoputri. This research was conducted using a qualitative method with data collection techniques of library research and discourse analysis. The research data was collected using secondary data collected through libraries, journals, books, articles, electronic media, websites, as well as speeches related to the presidential election. The findings show that there is sexism manifested in Islamic leadership discourse, such as gender stereotypes and the exclusion of women from high leadership positions. However, the post-Megawati Soekarnoputri presidential election showed significant changes in terms of gender inclusion in politics, with female candidates being seriously considered and greater participation of women in political campaigns. This research has important implications in the context of Muslim-majority Indonesia. By understanding the discourse of Islamic leadership and gender inclusion in politics, better gender equality can be achieved in Indonesian society.

Keywords: Gender Inclusion; Gender Stereotypes; Islamic Leadership; Politics; Sexism.

Riwayat Artikel:

Masuk: 13 Agustus 2023 | Revisi: 18 September 2023 | Diterima: 2 Oktober 2023 | Diterbitkan: 1 Juni 2024

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Islam memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Seiring dengan itu, isu-isu yang berkaitan dengan Islam, seperti kepemimpinan dan gender, juga menjadi topik yang relevan dalam konteks Indonesia. Dalam agama Islam, pemimpin ditempatkan dalam posisi penting dalam memimpin dan mengatur tata kelola negara, serta memberikan arahan dan pedoman dalam kehidupan masyarakat. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah kepemimpinan dalam Islam memiliki potensi seksisme, dimana gender menjadi faktor penentu utama dalam penentuan siapa yang pantas



memimpin. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat stereotipe gender dalam diskursus kepemimpinan Islam, di mana perempuan seringkali dianggap tidak memiliki kapasitas untuk memimpin atau berpartisipasi dalam politik. Hal ini mengarah pada eksklusi perempuan dari posisi kepemimpinan yang tinggi, serta pembatasan partisipasi perempuan dalam politik dan pembuatan kebijakan publik. Namun, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam hal inklusi gender dalam politik. Pasca Megawati Soekarnoputri, kandidat perempuan pertama yang menjadi presiden Indonesia, telah terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, baik sebagai kandidat maupun pemilih. Dalam pemilihan presiden Indonesia 2019, terdapat dua kandidat yang serius dipertimbangkan sebagai calon presiden, akan tetapi diantara kedua calon tersebut tidak adanya keikutsertaan perempuan sebagai kandidat.

Menurut Soekarnoputri (2021), Megawati Soekarnoputri di masa kepemimpinannya pada tahun 2001-2004, menghadapi krisis multidimensi yang terdiri atas krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, konflik lingkungan, serta krisis bidang pertahanan dan keamanan. Krisis ekonomi yang diselesaikan melalui berbagai upaya perundingan, diplomasi, dan kebijakan pembangunan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan; krisis politik dalam negeri dan luar negeri yang diselesaikan melalui kebijakan-kebijakan politik dan diplomasi sesuai amanat UUD 1945; krisis social yang berupa konflik masyarakat etnik dan agama yang diselesaikan melalui berbagai perundingan damai dan kesepakatan bersama; konflik lingkungan yang diselesaikan melalui pengesahan kebijakan pemerintah dan pembentukan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan; serta krisis bidang pertahanan dan keamanan yang diselesaikan melalui pengesahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan kebijakan penyejahteraan prajurit TNI/Polri. Keberhasilan



Megawati ini menjadi pencapaian besarnya selama menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini dapat membuat inklusi perempuan dalam kepemimpinan menjadi semakin tinggi.

Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh yang bukan saja dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad SAW, para Shahabat dan al-Khulafa' al-Rosyidin. Bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, Berkembang dinamis karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan budaya. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'I atau yang biasa dikenal dengan sebutan Al-Ghazali adalah salah satu ulama/pemikir abad pertengahan yang memiliki perhatian dalam permasalahan politik atau kekuasaan. Menurut beliau etika politik harus didasari oleh Aqidah islam. Karenanya, antara moral dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Moral politik yang dimaksud harus berdasarkan ajaran agama Islam atau moralitas islam yang mengajarkan manusia dalam setiap aktifitasnya harus berorientasi pada hubungan vertical dan horizontal. Dalam konteks politik, hubungan vertikal seorang pemimpin atau penguasa harus mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan dalam hubungan horizontal seorang pemimpin atau penguasa bertanggungjawab atas rakyatnya, sehingga akan membawa masyarakat yang adil makmur dengan ditopang moral yang bersendikan agama. Sumber kekuasaan menurut Al-Ghazali adalah dari Tuhan dan mendapatkan legitimasi (pengakuan) dari rakyat. Orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan kekuasaan itu dalam rangka li maslahatil 'ammah (demi kepentingan umat).

Istilah kepemimpinan dalam perspektif Islam dapat kita lihat dari Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 30:



بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ الدِّمَاءُ وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَنْ فِيهَا أَنْتَجَلُ قَالُوا ۗ خَلِيفَةُ الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ أَنِّي ۖ لِلْمَلَكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ
تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ ۗ لَكَ وَنُقَدِّسُ

“Dan(ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih, memuji-Mu, dan menyucikan nama-Mu? Dia berfirman,Sungguh Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”

Istilah yang dipakai di dalam ayat diatas yaitu Khalifah, merupakan pemimpin yang memikul amanah dan tanggung jawab untuk mengakkan yang ma’ruf dan mencegah yang munkar. Kemudian istilah lain yang dipakai yaitu Imam, pemimpin yang menjalankan tanggung jawab berdasarkan petunjuk Allah. Kepemimpinan Islami bukanlah kepemimpinan yang absolut ataupun kepemimpinan yang otoriter, karena Islam telah menunjukkancirinya yang berada ditengah-tengah dengan prinsip keseimbangan. Kekhasan kepemimpinan Islami berada pada keseimbangan dengan adanya penerapan syura atau musyawarah, Rasulullah SAW mencontohkan dengan selalu menerapkan musyawarah ini dalam setiap urusan seperti kenegaraan, peperangan, maupun kemaslahatan umum. Dalam Kepemimpinan Islami, tingkah laku pemimpin juga menjadi acuan, karenanya seorang pemimpin akan dijadikan teladan oleh anggotanya, perilaku pemimpin yang baik, standar nilai dan etika yang tinggi, dan perbuatannya terhadap sesama ataupun kelompok, dengan hal tersebut tentu akan menarik dukungan dan kerjasama dari anggota untuk patuh dan menghormati seorang pemimpinnya. Dengan demikian kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan rasullullah saw sebagai suri tauladan baik bagi seluruh umat islam. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya mau bekerjasama di bawah arahannya untuk mencapai tujuan yang di ridhoi Allah SWT. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mukmin. Pemimpin ini



“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”

Sementara itu Yusuf Qardlawi dalam fatwanya mengemukakan tiga catatan mengenai penetapan hadits tersebut dijadikan dalil penolakan kepemimpinan Wanita:

1. Apakah hadits ini diberlakukan atas keumumannya ataukah terbatas pada sebab wurudnya? Dalam pengertian bahwa rasulullah saw hendak memberitahukan ketidak beruntungan bangsa Persia yang menurut ketentuan hukum yang turun temurun harus mengangkat putri Kisra sebagai kepala pemerintahan mereka, meskipun dikalangan bangsa itu ada orang yang jauh lebih baik, lebih layak dan utama daripada putri itu? Benar, kebanyakan ahli al-ushul menetapkan bahwa yang terpakai ialah keumuman lafal, bukan sebab khusus.
2. Para ulama umat telah sepakat akan terlarangnya wanita akan kekuasaan tertinggi atau al-Imamah al-Uzham sebagaimana yang ditunjuki oleh hadits tersebut. ketentuan ini telah berlaku bagi wanita jika ia menjadi Raja atau Kepala Negara yang mempunyai kekuatan mutlak bagi kaumnya, yang segala kehendaknya harus dijalankan, semua hukumnya tidak boleh ditolak dan selain perintahnya tidak boleh dikukuhkan, dengan demikian, berarti mereka



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

telah benar-benar menyerahkan segala urusan kepadanya, yakni semua urusan umum mereka berada ditangannya, dibawah kekuasaannya dan komandonya.

3. Masyarakat modern dibawah sistem demokrasi, apabila memberikan kedudukan umum kepada wanita, seperti pada kementrian, perkantoran, atau didewan perwakilan, tidak berarti mereka menyerahkan segala urusannya kepada wanita, pada kenyataan tanggung jawab tersebut bersifat kolektif, dijalankan secara bersama-sama oleh sejumlah orang dalam lembaga terkait, dan wanita hanya menanggung sebagian saja bersama yang lain.

Pendapat ulama' tentang kepemimpinan perempuan ini, seluruh ulama sepakat bahwa wanita haram menduduki jabatan kekhalifaan. Jadi masalah haramnya perempuan menjadi pemimpin negara bukanlah masalah khilafiyah. Imam Al-Qurthubiy, menyatakan dalam tafsirnya *Al-Jaami'li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 1. hal. 270, menyatakan bahwa: "*Khalifah haruslah seorang laki-laki dan mereka (para fuqaha) telah bersepakat bahwa wanita tidak boleh menjadi imam (khalifah)*". Sementara Ath-Thabari dan Ibnu Hazm masih membolehkan jika wanita menjadi perdana Menteri atau hakim.

Pada satu sisi, agama Islam memiliki prinsip kesetaraan gender dan memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Namun, di sisi lain, budaya patriarki dan penafsiran agama yang tradisional seringkali membatasi partisipasi perempuan dalam kepemimpinan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa diskursus kepemimpinan Islam seringkali dipenuhi dengan stereotipe gender. Dalam diskursus ini, perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk yang lemah, emosional, dan tidak mampu memimpin. Stereotipe ini kemudian digunakan untuk membenarkan eksklusi perempuan dari posisi kepemimpinan yang tinggi. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa ada



perubahan dalam diskursus kepemimpinan Islam, terutama pasca Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri menjadi presiden pertama perempuan di Indonesia pada tahun 2001 dan telah membuka jalan bagi partisipasi perempuan dalam politik. Terdapat perubahan dalam persepsi masyarakat tentang kemampuan perempuan untuk memimpin, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. Isu seksisme dalam kepemimpinan Islam memang menjadi topik yang sensitif dan kompleks. Hasil dari tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami apakah terdapat seksisme dalam kepemimpinan Islam, serta memberikan gambaran tentang perubahan inklusi gender dalam politik Indonesia untuk memberikan kontribusi dalam mendorong inklusi gender dalam politik dan pembuatan kebijakan publik.

Literature Review

Menurut Akrim (2021) Studi ini membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam pendidikan Islam dan bagaimana mereka dihadapkan pada stereotipe gender dan budaya patriarki yang kuat. Penulis menyatakan bahwa di dalam budaya Islam, perempuan memiliki peran penting dalam mendidik dan mengajar anak-anak, namun, dalam konteks kepemimpinan, perempuan masih dianggap sebagai makhluk yang lemah dan tidak mampu memimpin. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam pendidikan Islam masih dihadapkan pada tantangan besar yang berkaitan dengan stereotipe gender. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat kemajuan dalam inklusi gender dalam pendidikan Islam, dengan semakin banyaknya perempuan yang memegang posisi penting dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Menurut Vijayarasa (2021) Studi ini melakukan penelitian tentang representasi gender dalam kepemimpinan di dua negara Indonesia dan Filipina. Penulis



menunjukkan bahwa terdapat beberapa perempuan yang memegang posisi penting dalam politik, gagasan bahwa kehadiran pemimpin perempuan dapat berarti peluang baru dan berbeda untuk advokasi gerakan perempuan, terutama adanya ekspektasi yang diakui bahwa pemimpin perempuan berbuat lebih banyak dan memimpin dengan lebih baik untuk sesama perempuan. Studi kasus pada penelitian ini meskipun berbeda, mengisyaratkan kemungkinan bahwa gerakan perempuan menerapkan strategi tertentu ketika seorang perempuan menduduki jabatan eksekutif. Kelompok-kelompok perempuan dapat memanfaatkan kekuatan suara perempuan. Para aktivis, seringkali di bawah kepemimpinan tokoh perempuan, birokrat, atau legislator terkemuka, berusaha untuk berdebat, memobilisasi, dan bersatu (dengan tingkat konsensus terbesar yang dapat dicapai), untuk menggunakan peluang yang ada menjadi perkembangan hukum dan kebijakan yang positif. Strategi yang digunakan adalah umum untuk Gerakan perempuan terlepas dari apakah yang memimpin seorang perempuan. Diantaranya seperti menarik perhatian media massa, parlemen balkon, dan pergeseran ke arah sudut pandang yang lebih radikal dan konservatif. Jurnal ini, sebagai studi komparatif yang mengaitkan hukum, kepemimpinan, dan advokasi gerakan, memberikan kesan bahwa kehadiran perempuan dalam jabatan eksekutif dapat berarti kemungkinan, peluang, dan harapan yang berbeda, ketika perempuan memimpin.

Jurnal yang berjudul "*Is There a Sexism in Islamic Leadership? The Case of the Sultanahs in Lanao Sultanate, Philippines*" menyajikan sebuah penelitian tentang seksisme dalam kepemimpinan Islam di wilayah Filipina. Studi ini menunjukkan bahwa sultanah-sultanah di wilayah Lanao Sultanate memiliki peran penting dalam kepemimpinan masyarakat, namun, mereka dihadapkan pada tantangan besar dalam mendapatkan pengakuan dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat yang



masih didominasi oleh laki-laki. Penelitian ini menunjukkan bahwa seksisme dalam kepemimpinan Islam masih menjadi masalah yang serius, namun, adanya sultanah-sultanah yang memegang posisi penting dalam kepemimpinan di wilayah tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam inklusi gender dalam kepemimpinan Islam. Studi ini juga menunjukkan adanya perubahan dalam persepsi masyarakat tentang peran perempuan dalam kepemimpinan, yang menunjukkan adanya potensi untuk inklusi gender yang lebih besar di masa depan.

Metode

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa tertentu dengan interpretasi secara mendalam melalui kalimat dan linguistik, sehingga data tidak berbentuk angka ataupun bilangan yang dapat diolah secara statistik. Untuk melengkapi data, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data library research dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui perpustakaan, jurnal, buku, artikel, media elektronik, dan website serta wacana analisis, dimana data didapatkan melalui berita yang diunggah di laman resmi surat kabar, lalu dikumpulkan menjadi data untuk pengklasifikasian, kemudian disusun, diringkas, dianalisa, serta disimpulkan sesuai permasalahan artikel yang diteliti.

Hasil dan Diskusi

Tanggal 1 Mei 2023, Komisi Pemilihan Umum telah membuka pendaftaran calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bersamaan dengan langkah-langkah tersebut, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 resmi disahkan oleh KPU untuk memperbaiki aturan terkait keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024. Peraturan ini menetapkan alokasi 30 persen kursi legislatif untuk perempuan seperti yang



ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun, peraturan ini menuai kritik karena mengubah cara menghitung alokasi 30 persen kursi legislatif untuk perempuan, dengan hasilnya dibulatkan dua desimal ke bawah untuk suara di bawah 50 dan dua desimal ke atas untuk suara di atas 50. Dengan perubahan ini, hanya pemilik suara terbanyak yang dapat lolos menjadi anggota legislatif. Selain itu, kuota 30 persen calon perempuan di setiap daerah pemilihan legislatif dapat menurunkan peluang perempuan untuk menduduki kursi legislatif. Polemik PKPU ini menghinggap dunia pemilu Indonesia, yaitu representasi perempuan dalam politik. Sejak Pilkada 2018, perempuan kurang berpartisipasi dalam politik dibandingkan dengan negara lain, seperti yang ditunjukkan oleh proporsi laki-laki dalam perwakilan legislatif (DPR dan DPRD) dan kepemimpinan eksekutif (presiden hingga kepala daerah).

Tabel 1 Keterlibatan Perempuan dalam Pilkada tahun 2018

No.	Provinsi / Kabupaten / Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen) 2018
1	Konawe Selatan	40
2	Kota Tomohon	40
3	Kota Depok	38
4	Kota Manado	37,14
5	Belu	36,67
6	Kota Tegal	36,67
7	Barito Selatan	36
8	Pulang Pisau	36
9	Manokwari Selatan	35
10	Raja Ampat	35
11	Siau Tagulandang Biaro	35
12	Kota Kendari	34,29
13	Kota Surabaya	34
14	Aceh Tamiang	33,33
15	Bantaeng	33,33
16	Kota Kediri	33,33



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

17	Kota Madiun	33,33
18	Kota Palangka Raya	33,33
19	Sulawesi Utara	33,33
20	Barito Utara	32
21	Kota Metro	32
22	Kota Mojokerto	32
23	Minahasa Tenggara	32
24	Labuhan Batu	31,82
25	Minahasa	31,43
26	Kota Cimahi	31,11
27	Pekalongan	31,11
28	Purbalingga	31,11
29	Temanggung	31,11
30	Minahasa Selatan	31,03
31	Kapuas	30,77
32	Kota Jayapura	30
33	Kota Sabang	30
34	Mahakam Ulu	30
35	Takalar	30
36	Kota Salatiga	29,17
37	Gorontalo	28,89
38	Karanganyar	28,89
39	Riau	28,13
40	Barru	28
41	Buton	28
42	Gunung Mas	28
43	Lebong	28
44	Kota Bitung	26,67
45	Maluku	26,67
46	Soppeng	26,67
47	Cirebon	26
48	Kediri	26
49	Kota Tangerang Selatan	26
50	Kuningan	26
51	Mojokerto	26
52	Kota Bengkulu	25,71
53	Jeneponto	25
54	Konawe Utara	25



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

55	Kota Yogyakarta	25
56	Minahasa Utara	25
57	Pringsewu	25
58	Pulau Taliabu	25
59	Sukamara	25
60	Banjar	24,44
61	Kalimantan Tengah	24,44
62	Kendal	24,44
63	Probolinggo	24,44
64	Purwakarta	24,44
65	Situbondo	24,44
66	Sulawesi Tengah	24,44
67	Kota Tanjung Pinang	24,14
68	Cianjur	24
69	Katingan	24
70	Kebumen	24
71	Kota Batu	24
72	Kota Kotamobagu	24
73	Kota Palopo	24
74	Sleman	24
75	Wakatobi	24
76	Banten	23,53
77	Bolaang Mongondow	23,33
78	Hulu Sungai Tengah	23,33
79	Konawe	23,33
80	Kota Banjar Baru	23,33
81	Kota Pematang Siantar	23,33
82	Sinjai	23,33
83	Tabalong	23,33
84	Tanjung Jabung Timur	23,33
85	Toli-Toli	23,33
86	Banggai	22,86
87	Gorontalo	22,86
88	Kota Baru	22,86
89	Kota Cirebon	22,86
90	Ngawi	22,22
91	Polewali Mandar	22,22
92	Rembang	22,22



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

93	Semarang	22,22
94	Bandung	22
95	Blitar	22
96	Indramayu	22
97	Jawa Barat	22
98	Jawa Tengah	22
99	Jember	22
100	Jombang	22
101	Kota Semarang	22
102	Malang	22
103	Sumatera Selatan	21,33
104	Kota Gorontalo	20,83
105	Merauke	20,69
106	Maluku Utara	20,45
107	Banyuwangi	20
108	Barito Timur	20
109	Batang	20
110	Belitung Timur	20
111	Bengkulu Tengah	20
112	Bolaang Mongondow Selatan	20
113	Bolaang Mongondow Timur	20
114	Buol	20
115	Fakfak	20
116	Gorontalo Utara	20
117	Halmahera Utara	20
118	Kaimana	20
119	Kalimantan Utara	20
120	Karawang	20
121	Karo	20
122	Kepahiang	20
123	Kota Bau-Bau	20
124	Kota Jambi	20
125	Kota Lubuklinggau	20
126	Kota Magelang	20
127	Kota Padang Panjang	20
128	Kota Pekalongan	20
129	Kota Samarinda	20
130	Kota Sawah Lunto	20



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

131	Kota Sibolga	20
132	Kota Surakarta	20
133	Kota Tangerang	20
134	Kotawaringin Timur	20
135	Majene	20
136	Malaka	20
137	Mamuju Tengah	20
138	Manokwari	20
139	Maros	20
140	Musi Banyuasin	20
141	Nabire	20
142	Nganjuk	20
143	Nias Selatan	20
144	Nunukan	20
145	Pegunungan Arfak	20
146	Pohuwato	20
147	Purworejo	20
148	Samosir	20
149	Serdang Bedagai	20
150	Seruyan	20
151	Subang	20
152	Sukoharjo	20
153	Tana Toraja	20
154	Tanggamus	20
155	Tegal	20
156	Teluk Bintuni	20
157	Dki Jakarta	19,81
158	Kepulauan Seribu	19,81
159	Kodya Jakarta Barat	19,81
160	Kodya Jakarta Pusat	19,81
161	Kodya Jakarta Selatan	19,81
162	Kodya Jakarta Timur	19,81
163	Kodya Jakarta Utara	19,81
164	Sulawesi Selatan	19,05
165	Tuban	18,37
166	Sulawesi Tenggara	18,18
167	Banyumas	18
168	Lamongan	18



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

169	Lumajang	18
170	Serang	18
171	Sumedang	18
172	Banjarnegara	17,78
173	Blora	17,78
174	Kep. Riau	17,78
175	Kota Balikpapan	17,78
176	Kota Banjarmasin	17,78
177	Kota Malang	17,78
178	Pesawaran	17,78
179	Sulawesi Barat	17,78
180	Bulukumba	17,5
181	Kulon Progo	17,5
182	Wajo	17,5
183	Indonesia	17,32
184	Sumatera Utara	17,17
185	Barito Kuala	17,14
186	Batang Hari	17,14
187	Bungo	17,14
188	Kota Cilegon	17,14
189	Pangandaran	17,14
190	Tanah Laut	17,14
191	Jambi	16,98
192	Aceh Tenggara	16,67
193	Bintan	16,67
194	Hulu Sungai Utara	16,67
195	Kepulauan Meranti	16,67
196	Kota Binjai	16,67
197	Kota Probolinggo	16,67
198	Kota Ternate	16,67
199	Pasir	16,67
200	Rejang Lebong	16,67
201	Kalimantan Selatan	16,36
202	Papua	16,36
203	Banggai Kepulauan	16
204	Biak Numfor	16
205	Boalemo	16
206	Brebes	16



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

207	Buru	16
208	Cilacap	16
209	Demak	16
210	Garut	16
211	Halmahera Barat	16
212	Kepulauan Sangihe	16
213	Kepulauan Selayar	16
214	Kota Bekasi	16
215	Kota Pagar Alam	16
216	Kota Pare-Pare	16
217	Kota Tanjung Balai	16
218	Kota Tidore Kepulauan	16
219	Kutai Barat	16
220	Magelang	16
221	Majalengka	16
222	Morowali	16
223	Morowali Utara	16
224	Murung Raya	16
225	Nagan Raya	16
226	Ngada	16
227	Pati	16
228	Pemalang	16
229	Sumba Barat	16
230	Tangerang	16
231	Tapin	16
232	Tasikmalaya	16
233	Asahan	15,56
234	Bengkulu	15,56
235	Kampar	15,56
236	Kota Padang	15,56
237	Kota Serang	15,56
238	Ponorogo	15,56
239	Sambas	15,56
240	Tulangbawang	15,56
241	Bima	15,22
242	Bolaang Mongondow Utara	15
243	Buton Utara	15
244	Dogiyai	15



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

245	Gayo Lues	15
246	Jawa Timur	15
247	Kapuas Hulu	15
248	Kota Subulussalam	15
249	Kutai Timur	15
250	Malinau	15
251	Mamberamo Raya	15
252	Pacitan	15
253	Pidie	15
254	Sorong Selatan	15
255	Supiori	15
256	Waropen	15
257	Way Kanan	15
258	Aceh	14,81
259	Kota Ambon	14,71
260	Tebo	14,71
261	Bangka	14,29
262	Batu Bara	14,29
263	Kota Palu	14,29
264	Kota Sukabumi	14,29
265	Kupang	14,29
266	Mamuju	14,29
267	Mesuji	14,29
268	Muaro Jambi	14,29
269	Tanjung Jabung Barat	14,29
270	Lampung	14,12
271	Gresik	14
272	Kota Makassar	14
273	Kota Palembang	14
274	Sidoarjo	14
275	Bone	13,33
276	Gunung Kidul	13,33
277	Hulu Sungai Selatan	13,33
278	Ketapang	13,33
279	Klungkung	13,33
280	Kolaka	13,33
281	Kota Dumai	13,33
282	Kota Padangsidimpuan	13,33



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

283	Kota Sorong	13,33
284	Kotawaringin Barat	13,33
285	Lombok Barat	13,33
286	Ogan Komering Ilir	13,33
287	Poso	13,33
288	Rokan Hulu	13,33
289	Tapanuli Selatan	13,33
290	Di Yogyakarta	12,73
291	Aceh Timur	12,5
292	Kota Kupang	12,5
293	Kota Mataram	12,5
294	Timor Tengah Selatan	12,5
295	Aceh Singkil	12
296	Balangan	12
297	Bandung Barat	12
298	Bangka Tengah	12
299	Bekasi	12
300	Bener Meriah	12
301	Bogor	12
302	Bojonegoro	12
303	Buton Tengah	12
304	Deli Serdang	12
305	Grobogan	12
306	Kaur	12
307	Kolaka Timur	12
308	Kota Bandar Lampung	12
309	Kota Bima	12
310	Kota Blitar	12
311	Kota Gunungsitoli	12
312	Kota Medan	12
313	Kota Prabumulih	12
314	Kota Tebing Tinggi	12
315	Lebak	12
316	Maluku Tenggara Barat	12
317	Mappi	12
318	Nias Utara	12
319	Pandeglang	12
320	Pasuruan	12



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

321	Pesisir Barat	12
322	Simalungun	12
323	Sorong	12
324	Sukabumi	12
325	Empat Lawang	11,76
326	Lampung Barat	11,76
327	Dairi	11,43
328	Jembrana	11,43
329	Luwu	11,43
330	Manggarai	11,43
331	Ogan Komering Ulu	11,43
332	Sintang	11,43
333	Tanah Datar	11,43
334	Banyu Asin	11,11
335	Boyolali	11,11
336	Buleleng	11,11
337	Kota Bogor	11,11
338	Kota Pekanbaru	11,11
339	Kota Tasikmalaya	11,11
340	Landak	11,11
341	Madiun	11,11
342	Trenggalek	11,11
343	Kalimantan Timur	10,91
344	Kalimantan Barat	10,77
345	Nusa Tenggara Timur	10,77
346	Sumatera Barat	10,77
347	Nias Barat	10,53
348	Aceh Tengah	10
349	Bengkayang	10
350	Bengkulu Utara	10
351	Berau	10
352	Boven Digoel	10
353	Buton Selatan	10
354	Ciamis	10
355	Dompu	10
356	Indragiri Hulu	10
357	Jayawijaya	10
358	Karimun	10



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

359	Kepulauan Anambas	10
360	Kepulauan Talaud	10
361	Kerinci	10
362	Kota Bandung	10
363	Kota Pasuruan	10
364	Kubu Raya	10
365	Lahat	10
366	Lampung Selatan	10
367	Lampung Timur	10
368	Mamberamo Tengah	10
369	Mamuju Utara	10
370	Muna	10
371	Muna Barat	10
372	Ogan Komering Ulu Selatan	10
373	Parigi Moutong	10
374	Pinrang	10
375	Pontianak	10
376	Pulau Morotai	10
377	Sanggau	10
378	Sarmi	10
379	Seluma	10
380	Seram Bagian Barat	10
381	Sijunjung	10
382	Simeulue	10
383	Tambrauw	10
384	Tana Tidung	10
385	Teluk Wondama	10
386	Tulangbawang Barat	10
387	Tulungagung	10
388	Yalimo	10
389	Konawe Kepulauan	9,52
390	Nusa Tenggara Barat	9,23
391	Bali	9,09
392	Bengkalis	8,89
393	Gowa	8,89
394	Indragiri Hilir	8,89
395	Kota Pontianak	8,89
396	Kutai Kartanegara	8,89



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

397	Lampung Utara	8,89
398	Muara Enim	8,89
399	Ogan Komering Ulu Timur	8,89
400	Sragen	8,89
401	Wonogiri	8,89
402	Labuhan Batu Selatan	8,82
403	Tapanuli Utara	8,82
404	Lima Puluh Kota	8,57
405	Pangkajene Dan Kepulauan	8,57
406	Pasaman	8,57
407	Sarolangun	8,57
408	Sikka	8,57
409	Solok	8,57
410	Bombana	8,33
411	Aceh Barat	8
412	Bangka Selatan	8
413	Jayapura	8
414	Jepara	8
415	Kepulauan Aru	8
416	Kota Banjar	8
417	Kota Bontang	8
418	Kota Bukittinggi	8
419	Kota Langsa	8
420	Kota Lhokseumawe	8
421	Kota Payakumbuh	8
422	Kota Singkawang	8
423	Lanny Jaya	8
424	Lombok Tengah	8
425	Maluku Tenggara	8
426	Mukomuko	8
427	Musi Rawas Utara	8
428	Nduga	8
429	Seram Bagian Timur	8
430	Tojo Una-Una	8
431	Badung	7,5
432	Gianyar	7,5
433	Maluku Tengah	7,5
434	Tabanan	7,5



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

435	Sigi	6,9
436	Alor	6,67
437	Bangli	6,67
438	Bantul	6,67
439	Bondowoso	6,67
440	Donggala	6,67
441	Enrekang	6,67
442	Kota Banda Aceh	6,67
443	Kota Pangkal Pinang	6,67
444	Kudus	6,67
445	Lombok Utara	6,67
446	Magetan	6,67
447	Mamasa	6,67
448	Padang Lawas Utara	6,67
449	Pamekasan	6,67
450	Pesisir Selatan	6,67
451	Puncak Jaya	6,67
452	Sumba Timur	6,67
453	Timor Tengah Utara	6,67
454	Toba Samosir	6,67
455	Tolikara	6,67
456	Wonosobo	6,67
457	Klaten	6
458	Kota Batam	6
459	Langkat	6
460	Lombok Timur	6
461	Rokan Hilir	5,77
462	Kuantan Singingi	5,71
463	Luwu Utara	5,71
464	Melawi	5,71
465	Pelalawan	5,71
466	Sidenreng Rappang	5,71
467	Tanah Bumbu	5,71
468	Tapanuli Tengah	5,71
469	Toraja Utara	5,71
470	Yahukimo	5,71
471	Papua Barat	5,36
472	Banggai Laut	5



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

473	Buru Selatan	5
474	Halmahera Tengah	5
475	Halmahera Timur	5
476	Keerom	5
477	Kota Pariaman	5
478	Kota Solok	5
479	Lamandau	5
480	Lingga	5
481	Mandailing Natal	5
482	Maybrat	5
483	Musi Rawas	5
484	Natuna	5
485	Ogan Ilir	5
486	Padang Pariaman	5
487	Sabu Raijua	5
488	Siak	5
489	Aceh Utara	4,44
490	Karang Asem	4,44
491	Kep. Bangka Belitung	4,44
492	Kepulauan Sula	4,35
493	Aceh Barat Daya	4
494	Asmat	4
495	Bangka Barat	4
496	Belitung	4
497	Bone Bolango	4
498	Bulongan	4
499	Dharmas Raya	4
500	Humbang Hasundutan	4
501	Kepulauan Yapen	4
502	Kota Tarakan	4
503	Lampung Tengah	4
504	Pegunungan Bintang	4
505	Penajam Paser Utara	4
506	Penukal Abab Lematang Ilir	4
507	Pidie Jaya	4
508	Rote Ndao	4
509	Sumenep	4
510	Aceh Selatan	3,33



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

511	Ende	3,33
512	Kayong Utara	3,33
513	Luwu Timur	3,33
514	Manggarai Barat	3,33
515	Manggarai Timur	3,33
516	Padang Lawas	3,33
517	Sekadau	3,33
518	Aceh Besar	2,86
519	Labuhan Batu Utara	2,86
520	Mimika	2,86
521	Bireuen	2,5
522	Pasaman Barat	2,5
523	Agam	2,22
524	Kota Denpasar	2,22
525	Sampang	2,22
526	Sumbawa	2,22
527	Aceh Jaya	0
528	Bangkalan	0
529	Bengkulu Selatan	0
530	Deiyai	0
531	Flores Timur	0
532	Halmahera Selatan	0
533	Intan Jaya	0
534	Kepulauan Mentawai	0
535	Kolaka Utara	0
536	Kota Sungai Penuh	0
537	Kota Tual	0
538	Lembata	0
539	Maluku Barat Daya	0
540	Merangin	0
541	Nagekeo	0
542	Nias	0
543	Pakpak Bharat	0
544	Paniai	0
545	Puncak	0
546	Solok Selatan	0
547	Sumba Barat Daya	0
548	Sumba Tengah	0



549	Sumbawa Barat	0
550	Bulungan	-
551	Kota Tarakan	-
552	Malinau	-
553	Nunukan	-
554	Tana Tidung	-

Ini tidak berarti bahwa perempuan dalam politik tidak ada. Publik masih melihat perempuan dalam politik dan partai politik sering mempertimbangkan kiprah mereka untuk Pemilu 2024. Contohnya seperti Khofifah Indar Parawansa, Puan Maharani, dan Tri Rismaharini, yang tidak diragukan lagi mampu dan sering disebut sebagai calon wakil presiden oleh berbagai lembaga survei. Namun, dapat dikatakan bahwa orang-orang yang berkiprah dalam politik saat ini sebagian besar berasal dari kalangan yang memiliki *privilege*, dan alasan mereka terpilih juga berasal dari jalur yang sudah dikuasai, seperti jaringan, hubungan keluarga, dan modal politik. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa politisi perempuan tampil saat kebanyakan dari kalangan mapan, dan hampir tidak ada politisi perempuan di luar kelompok ini.

Menurut Claudia Derichs dan Mark Thompson dalam *Dynasties and Female Political Leaders in Asia*, kepemimpinan perempuan di negara-negara yang paternalistik dan patriarkal sangat menarik dan menarik perhatian peneliti dan media Barat. Pada saat yang sama, jelas bahwa pemimpin perempuan yang berkuasa memiliki hubungan atau ikatan dengan politisi laki-laki. Penemuan Derichs dan Thompson juga dilengkapi oleh Annemari de Silva. Dalam buku berjudul *Dynasty and Double Standards: Women Leaders in South Asia*, disebutkan bahwa budaya politik dinasti seringkali memengaruhi kepemimpinan perempuan Asia. Laki-laki memiliki ruang yang lebih besar dan lebih luas untuk menjadi pemimpin secara meritokrat



dibandingkan dengan perempuan, menurut de Silva. Politisi perempuan Asia masih bergantung pada hubungan pribadi dan kekeluargaan dengan laki-laki berkuasa. Ternyata pola serupa juga ditemukan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Nama-nama seperti Megawati, Wan Azizah, Aung San Suu Kyi, Corazon Aquino, Macapagal Arroyo, hingga Yingluck Shinawatra. Aung San Suu Kyi, yang terlibat dalam kasus HAM Rohingnya, adalah anak dari pemimpin kemerdekaan sekaligus pendiri Myanmar, Aung San. Corazon Aquino, merupakan istri dari politisi kontroversial Filipina yang meninggal karena pembunuhan, Benigno Aquino Jr. Lalu Gloria Macapagal Arroyo adalah putri mantan presiden ke-9 Filipina, Diosdado Macapagal. Hingga Yingluck Shinawatra, adalah adik mantan Perdana Menteri dan milyuner Thailand, Thaksin Shinawatra. Di bagian Asia Timur ada nama Park Geun-hye, mantan presiden Korea, adalah anak dari mantan presiden Park Chung-hee. Benazir Bhutto dari Pakistan yang juga anak dari Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto yang meninggal dieksekusi. Hingga Indira Gandhi, Perdana Menteri perempuan pertama India yang juga putri dari Perdana Menteri India pertama, Jawaharlal Nehru. Dalam sistem demokrasi, rakyat memilih pemimpin tertentu, dan tidak semua orang mendapatkan jabatan hanya karena ditunjuk atau diwariskan. Namun perlu diingat hubungan peran perempuan dalam parlemen tidak terlepas dari pengaruh politisi laki-laki lainnya.

Ada banyak alasan mengapa perempuan tidak banyak memasuki dunia politik, dan penyebabnya dapat berbeda-beda di setiap negara. Namun demikian, tiga alasan utama mengapa perempuan tidak banyak yang memasuki dunia politik adalah faktor politik, faktor sosial-budaya, dan faktor psikologis. Faktor sosial mengacu pada adanya bias pragmatik di masyarakat, di mana situasi ini menggambarkan keyakinan bahwa partisipasi perempuan dalam politik akan mengganggu peran tradisional



mereka. Sulit bagi perempuan untuk menjadi pemimpin karena konstituen tidak memilih kader perempuan dan percaya bahwa perempuan tidak bisa memimpin. Di Indonesia, bias pragmatis lebih banyak disebabkan oleh kultur patriarki yang mensyaratkan ketidakpercayaan pada kemampuan perempuan untuk memimpin, yang juga tertanam pada perempuan. Akibatnya, konstituen perempuan tidak mendukung perwakilan mereka dalam pemilu. Namun demikian, selain faktor sosial-budaya yang menjadi penyebab utama kurangnya perempuan yang berpartisipasi dalam politik, faktor psikologis sangat berpengaruh, meskipun kurang dikenal. Ini terkait dengan dilema *dual parenting*, yang menunjukkan bahwa ibu tidak lagi satu-satunya yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak, tanggung jawab ini dapat dibagi kepada pasangan atau pekerja rumah tangga (PRT). Ini dilakukan oleh perempuan yang memiliki kemampuan untuk mempekerjakan PRT, dan tujuan dari PRT adalah untuk menggantikan peran orang tua yang mengasuh anak saat mereka bekerja. Di satu sisi, pembagian ini merupakan emansipasi perempuan yang menghasilkan kesempatan bagi perempuan untuk belajar dan berkarir untuk meningkatkan status sosialnya. Namun, *dual parenting* hanya dapat dilakukan oleh perempuan kaya karena mereka memiliki modal untuk membagi peran mereka sebagai PRT. Kemapanan ekonomi ini juga tidak tersebar secara merata di antara semua perempuan, sehingga hanya segelintir orang yang memiliki kesempatan berpolitik.

Karena mayoritas politisi perempuan di parlemen saat ini berasal dari keluarga politisi atau memiliki jejaring organisasi tertentu, penampilan mereka dalam politik saat ini juga dibayangi oleh eksklusivisme. Setelah itu, hampir tidak ada politisi perempuan yang mulai berjuang dari awal. Dalam pemilu Indonesia, eksklusivisme yang ditunjukkan oleh tokoh perempuan terkenal mencerminkan politik klientelisme



yang masih kuat. Karena implementasi proporsional terbuka dan budaya klientelisme yang kuat, perempuan tidak dapat langsung maju di pemilu hanya karena amanat 30%. Di tengah kompetisi elektoral yang semakin ketat, sistem ini "memaksa" kontestan untuk mengeluarkan modal besar untuk mobilisasi suara kepada konstituen mereka. Selain itu, karena praktik politik sangat mahal, setiap kandidat harus memiliki sumber daya ekonomi-politik yang cukup untuk terpilih, jadi tidak mengherankan banyak pejabat berasal dari kalangan "berada". Selain itu, pola ini berlaku untuk perempuan; fakta bahwa mereka yang menjadi politisi juga berasal dari kalangan yang mapan menunjukkan bahwa relasi klientelistik mendukung mereka yang mewakili perempuan. Selain karena mereka tidak memikul beban pengasuhan rumah tangga secara penuh, keadaan politik yang klientel hanya memungkinkan mereka yang sudah mapan untuk berkontestasi dalam pemilu. Oleh karena itu, mayoritas politisi perempuan tidak sepenuhnya mewakili keinginan konstituennya, dan seringkali mereka terjebak dalam bisnis patron-klien yang "memaksa" mereka untuk menyetujui peraturan yang menguntungkan pemodal. Salah satu bukti ketidakmampuan banyak politisi perempuan di DPR untuk mempercepat pengesahan undang-undang ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun negosiasi yang alot adalah masalah utama, penyebab sebenarnya adalah lanskap politik yang tidak berpihak pada perempuan, yang menghalangi perempuan untuk mewakili konstituen mereka di parlemen. Dengan kondisi politik yang demikian, jika lanskap elektoral tidak mengalami perubahan yang signifikan, jumlah perempuan yang mencalonkan diri dapat berkurang.

Kesimpulan



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

Beberapa kesimpulan dari tulisan ini yaitu salah satu masalah utama adalah rendahnya representasi perempuan dalam politik di Indonesia. Meskipun perempuan merupakan sekitar setengah dari populasi, mereka masih kurang diwakili dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan pemerintahan pada tingkat lokal dan nasional. Kemudian beberapa hambatan yang dihadapi perempuan dalam terlibat dalam politik adalah karena peran tradisional yang masih kuat dalam masyarakat.

Peran sosial yang ditetapkan secara stereotipikal dapat menghambat partisipasi perempuan dalam kegiatan politik dan pengambilan keputusan. Dan juga budaya patriarki yang masih dominan di masyarakat Indonesia juga berkontribusi pada ketimpangan gender dalam politik. Norma sosial yang mendukung peran perempuan sebagai pengurus rumah tangga dan penjaga keluarga sering kali membatasi aspirasi politik mereka.

Daftar Pustaka

- Akrim, A. (2021). [BUKU] PEREMPUAN DALAM DINAMIKA SOSIAL MODERN. Aksaqila Jabfung.
- Aronson, P. (2011). Dual-Earner Couples. In *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*. John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosd096.pub2>
- Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 3–27. <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>
- Corbett, C., Voelkel, J. G., Cooper, M., & Willer, R. (2022). Pragmatic bias impedes women's access to political leadership. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(6). <https://doi.org/10.1073/pnas.2112616119>
- Fatimah, S. (2015). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an. *dalam Jurnal al-Hikmah Studi Keislaman*, 5(1).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/249179/peraturan-kpu-no-10-tahun-2023>



<https://ejournal.uki.ac.id/index.php/inada/> email: jurnal.inada@uki.ac.id

- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat ke-30. Diakses dari <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-30>.
- Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat ke-34. Diakses dari <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-34>.
- Munfaridah, T. (2016). Kepemimpinan dalam islam. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 14(1).
- Olifiansyah, M., Hidayat, W., Dianying, B. P., & Dzulfiqar, M. (2020). Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 14(1), 98–111. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v14i1.2123>
- Permana, A. N. (2022). *Kepemimpinan Perempuan Refleksi Pemikiran Neng Dara Affiah Dalam Bukunya "Islam, Kepemimpinan Dan Seksualitas* (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Racman, S. H. A. (2022). Is there a Sexism in Islamic Leadership? The Case of the Sultanahs in Lanao Sultanate, Philippines. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 12(2), 88-102.
- Soekarnoputri, M (2021). Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, jurnal.idu.ac.id, <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/IPBH/article/view/1211>
- Sugara, R., Junaidi, J., & Nurbaiti, N. (2021). Kesetaraan Gender di Indonesia (Studi Kiprah Megawati, Najwa Shihab dan Siti Baroroh) (Doctoral dissertation, UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI).
- Vijeyarasa, R. (2021). Women's movements under women presidents: bringing a gender perspective to the legal system. *Gender & Development*, 29(2-3), 569-591.